

**PROBLEMATIKA SISTEM PENYALURAN DANA DALAM PROGRAM
INDONESIA PINTAR (PIP) PADA SEKOLAH MADRASAH “X” DI
KABUPATEN PAMEKASAN**

Yudisya Fatihatun Fitriani

Siti Musyarofah

Bambang Haryadi

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini, yaitu pertama mengetahui problematika system penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) pada sekolah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum di Kabupaten Pamekasan-Madura. Kedua, mengetahui model-model pencegahan terhadap aktifitas penyalahgunaan pada penyaluran dana dalam Kartu Indonesia Pintar pada sekolah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum di Kabupaten Pamekasan-Madura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian Problematika system penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar memuat beberapa problem yaitu : Perekrutan Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dimana terjadi penyimpangan dan tidak focusnya pada visi dan misi PIP, karena berdasarkan petunjuk teknis, yaitu semua siswa yang memiliki KIP pasti mendapatkan bantuan PIP. Realitanya hanya siswa tertentu saja yang mendapatkan bantuan PIP. Artinya, pendistribusian PIP masih lemah dan tidak ada control yang baik oleh pemerintah. Pada saat Proses Hingga Dana Cair ditemukannya keanehan, seperti adanya potongan dan penyalahgunaan dana PIP oleh siswa, yaitu bukan untuk keperluan sekolahnya. Sehingga diduga akan mudah terjadi *fraud*. Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar (PIP) dikelola oleh panitia yang tidak sesuai dengan juknis dimana peran bendahara sekolah tidak nampak dalam penyaluran dana ini atau ditiadakan, dan yang lebih berperan aktif adalah Badan Konseling (BK), dimana kita ketahui internal kontrol yang diterapkan dengan baik maka hasilnya pun juga baik demikian jika suatu aktifitas penyaluran dana dipegang oleh yang ahli dalam bidangnya akan lebih tercapai sesuai dengan tujuan. Model-Model Pencegahan Pertama supervisi, yaitu melakukan evaluasi rutin, jika ada kasus langsung ditemukan solusinya, sehingga memastikan PIP tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat guna. Kedua melakukan pengawasan dan pengendalian yang terstruktur, sistematis dan masif secara internal dan eksternal. Terakhir adanya sanksi tegas atas penyelewengan.

Keyword: Problematika Program Indonesia Pintar dan Tindakan Fraud